

Cite this: *J.SST*, Vol.3(2):
198-205, 2024

Strategi Komunikasi Politik Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam Menjaga Semangat Nasionalisme

Pemerintah Kabupaten Nunukan Political Communication Strategy Inorder to Guard Nationalism Enthusiastic

Received Date:
5 Maret 2024
Accepted Date:
19 Maret 2024

Gatot Fajar Wisanto^{1*}; Nur Alim Djalil²; Muhammad Asdar³
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar, Kota Makassar,
90231, Indonesia

*Email: gatofajarwisanto@gmail.com; (Email institusi, pascasarjana@unifa.ac.id)

Keywords:
Strategy, Communication, Border Area.

Kata kunci:
Strategi, Komunikasi, Wilayah Perbatasan

Abstract. *Unbalanced information from Malaysia and Indonesia border area, makes people behaviour imitated Malaysian life style, including the language and philosophy of life, more of that in neighbourhood we can see the citizen used currency in rupiah and ringgit. This study locus in Kabupaten Nunukan border area, will give a picture so minimal information from Indonesia in other way how massive information from Malaysia gets to citizen in border area. This qualitatif descriptive study used data collection, interview and direct observation. A competent informant will explain infrastructure how infrastructure develop in border area. The result of this tudy show significant development of Pemerintah Kabupaten Nunukan communication strategy applied, especially for communication infrastructure like tower for citizen to acces internet, this infrastructure fulfillment is one of component for E-Government in Kabupaten Nunukan.*

Keywords: *Strategy, Communication, Border Area*

Abstrak. Informasi yang diterima masyarakat dan tidak berimbang dari Malaysia dan Indonesia, membuat gaya hidup warga Malaysia, termasuk gaya bicara maupun falsafah hidup, bahkan warga masyarakat dapat menggunakan mata uang ringgit dan rupiah secara bebas. Penelitian dengan lokus yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, akan memberikan gambaran tentang besarnya pengaruh Malaysia di Nunukan, terutama di wilayah perbatasan yang minim informasi dari Indonesia sedangkan informasi dari Malaysia dapat dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan metode pengumpulan data, wawancara serta observasi langsung. Dengan informan yang memiliki kompetensi dalam memberikan penjelasan perkembangan infrastruktur di wilayah perbatasan. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan yang signifikan atas strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Nunukan, terutama pada pemenuhan infrastruktur jaringan komunikasi berupa menara agar warga dapat mengakses internet. Pemenuhan infrastruktur ini juga merupakan salah satu instrumen dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Nunukan

Kata kunci: Strategi, Komunikasi, Wilayah Perbatasan.

PENDAHULUAN

Kabupaten Nunukan adalah salah satu DOB yang terbentang dan memiliki luas 14.247, 50 Km² terdiri menjadi 21 Kecamatan, dengan 18 diantaranya adalah kecamatan perbatasan. Dengan posisi geografis bersebelahan dengan Negara Malaysia membuat kontak budaya menjadi sangat dekat, kebutuhan hidup yang selalu dipenuhi dari Malaysia, bahkan untuk falsafah hidup lebih erat dengan Malaysia secara personal, dan ini tentu menjadi nilai negatif berada dalam wilayah perbatasan, letak geografis yang dekat dengan luar negeri membuat problematika permasalahan menjadi sangat beragam, terutama ketika hal ini dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab untuk membuka peluang perdagangan orang dan pintu masuk peredaran narkoba.

Semenjak terbentuk melalui Undang-undang 47 Tahun 1999, Pemerintah Kabupaten Nunukan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Untuk memudahkan pelayanan, Kabupaten Nunukan yang pada awalnya hanya 5 Kecamatan kini telah berkembang menjadi 21 Kecamatan, dengan Kecamatan Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangon merupakan daerah yang terakhir dimekarkan pada Tahun 2019. Pemekaran ini tentu tidak dilakukan bukan tanpa alasan, tetapi ini untuk pemerintah agar lebih dekat warga masyarakat sehingga perhatian pemerintah menjadi lebih fokus dan terarah. Kini Pemerintah Kabupaten Nunukan didukung dengan 29 Perangkat Daerah, 3 Staf Ahli dan 21 Kecamatan. Dibantu dengan 3 Orang Asisten, Sekretaris Daerah sebagai Pejabat yang Berwenang memberikan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kepada semua perangkat daerah.

Selama puluhan tahun, warga perbatasan telah menggantungkan hidup dengan Malaysia, hal ini menjadi sangat wajar apabila kita melihat dari sisi perekonomian yang menggunakan dua mata uang untuk bertransaksi jual beli, bahkan dalam memasarkan dan menjual produk komoditas hasil bumi ke Malaysia diberikan kemudahan setiap orang melewati perbatasan. Dari sisi informasi dan komunikasi, kemudahan informasi yang didapat untuk siaran televisi dan radio yang didapat dari Malaysia menyebabkan siaran televisi yang diterima hanya siaran Malaysia, baik siaran analog, digital, maupun layanan televisi berbayar. Namun dibalik kemudahan-kemudahan ini, menimbulkan perubahan yang drastis dalam karakter warga perbatasan.

Siaran televisi Malaysia yang bisa didapatkan dengan menggunakan antena biasa, membuat siaran dapat diakses secara analog, sedangkan untuk mendapatkan siaran Indonesia warga perbatasan harus menyiapkan decoder sebagai alat tambahan, sehingga pada tanggal 2 November 2022 Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memutuskan siaran analog, warga perbatasan tidak terpengaruh terhadap kebijakan ini.

Nasionalisme berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Wujud sengketa perbatasan di Kabupaten Nunukan telah melebur dalam kontak budaya dan kehidupan sehari-hari, hal ini bisa kita lihat dari rumah yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah dibangun pada garis perbatasan, sehingga rumah ini memiliki 2 batasan wilayah Indonesia dan Malaysia. Hal demikian hampir terjadi diseluruh wilayah perbatasan Nunukan, tetapi hal ini kemudian memberikan kemudahan setiap warga perbatasan dalam melintasi perbatasan. Nasionalisme warga perbatasan tidak perlu diragukan lagi, kebanggaan mereka akan Indonesia adalah hal yang patut kita banggakan, karena ditengah keterbatasan hidup, kesetiaan dengan Indonesia dengan tanpa pamrih, namun dalam kehidupan terdapat hal-hal janggal yang menjadi lelucon sehari-hari, misal saja ketika kita bertanya, tentang falsafah negara, warga diperbatasan lebih mengenal Rukun Negara dibandingkan dengan menghafal Pancasila, atau dengan munculnya jargon “Garuda di Dada Ku, Harimau di Perut Ku”, ini tentu menggelitik setiap orang yang mendengar, namun melihat hal ini menjadi sebuah kewajaran karena selama bertahun-tahun mereka hanya mendengar informasi dari Malaysia tentang doktrin kebangsaan dalam aktivitas keseharian, sementara pengetahuan tentang kebangsaan Indonesia hanya didapat dari pada jam sekolah. Bibit-bibit disintegrasikan

tentu harus dapat segera diatasi, agar kedepannya nilai-nilai kebangsaan dan semangat nasionalisme dapat terus dipupuk.

Pengembangan infrastruktur untuk semua wilayah terus didorong, hingga Kabupaten Nunukan menjadi salah satu daerah dengan lokasi prioritas yang paling tinggi di Indonesia sebanyak 15 Lokpri, diantaranya adalah pembangunan Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan, PLBN Sei Pancang di Kecamatan Sebatik Utara dan PLBN Long Midang di Kecamatan Krayan. Pembangunan infrastruktur ini memberikan dampak yang signifikan, terutama bagi masyarakat dikecamatan tersebut. Pembangunan ini selain mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur bangunan dan jalan didaerah perbatasan, hal ini juga turut mendorong upaya pembangunan infrastruktur jaringan internet di Kabupaten Nunukan.

PLBN Labang adalah salah satu bentuk akselerasi pembangunan yang terlihat nyata di Kabupaten Nunukan, ini terlihat dari dampak yang terjadi terhadap Desa Labang secara khusus dan Kecamatan Lumbis Pansiangan secara umum. Untuk mengoperasikan PLBN Labang tentu membutuhkan daya listrik yang besar, sehingga membutuhkan dukungan dari PLN, sehingga atas hal ini Kecamatan Lumbis Pansiangan juga terpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur listrik dan kini telah masuk aliran listrik.

Demikian pula dengan pembangunan PLBN Long Midang di Kecamatan Krayan yang juga memberikan pengaruh yang besar terhadap pesatnya kemajuan daerah perbatasan. Selain memberi dampak lokal, pembangunan PLBN Long Midang memberikan dampak secara nasional, sebab pembangunan fasilitas ini mendapat perhatian khusus dari Presiden Jokowi yang diwujudkan dalam kunjungan kerja kepresidenan beserta dengan para menteri. Masyarakat Kecamatan Krayan kini memiliki jalan berkualitas seperti di Jakarta bahkan Presiden Jokowi beserta rombongan ikut menjajal jalan yang telah dibangun dengan menggunakan motor pribadi.

PLBN Sei Pancang di Kecamatan Sebatik Utara juga turut menambah akses ke Malaysia menjadi 4 pelabuhan besar, Pelabuhan Tunon Taka, PLBN Labang, PLBN Long Midang, dan PLBN Sei Pancang. Desa Sei Pancang dipilih untuk dibangun PLBN karena Pulau Sebatik menjadi akses yang berada ditengah yang menghubungkan daerah diluar Nunukan, dengan akses paling dekat ke Malaysia.

Perkembangan teknologi komunikasi seiring dengan revolusi industri 4.0 membuat batasan ruang dan waktu menjadi tidak ada, bahkan kini tatap muka dapat dilakukan kapan saja selama infrastruktur yang ada mendukung perangkat yang digunakan. Sejalan dengan ini, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 terus mendorong kemajuan teknologi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terlebih lagi pada setahun setelah penetapan aturan ini, dunia dilanda oleh Pandemi Corona Virus 2019, yang membuat sistem dan pola kerja pemerintahan berubah drastis dengan memanfaatkan teknologi sebagai pendukung mekanisme kerja.

Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Nunukan berupaya untuk melakukan pemenuhan jaringan pendukung agar dapat menghubungkan antara daerah-daerah yang selama ini terisolasi penggunaan internet, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Nunukan telah lulus asesmen pembangunan smart city. Pembangunan infrastruktur pendukung ini selain sebagai instrumen dalam pemenuhan persyaratan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, juga memberikan dampak yang berarti terhadap masyarakat, karena pembangunan ini difokuskan pada titik yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, seperti instansi pemerintah, puskesmas, puskesmas pembantu, kantor desa, sekolah bahkan pada titik keramaian yang diperkirakan banyak masyarakat beraktivitas seperti alun-alun dan lapangan olah raga.

Kemudahan melakukan aktivitas didunia maya, dapat menggerakkan perekonomian masyarakat diperbatasan, terutama masyarakat didaerah ini bekerja sebagai petani, sehingga warga dapat membuka toko online dengan target pemasaran berada diwilayah Indonesia, yang sebelumnya para petani ini menjual komoditas hasil bumi ke Malaysia. Dibeberapa daerah seperti Krayan, selama bertahun-tahun menjual beras, garam dan hasil pertanian lainnya ke Malaysia dengan menggunakan metode menjual kepedagang yang ada di Malaysia tanpa memasarkan produk tersebut ke Indonesia, hal ini sangat dilematis, karena untuk mencapai

daerah ini hanya dapat diakses oleh pesawat terbang, sehingga biaya untuk pengiriman jauh lebih mahal ketimbang harga barang itu sendiri. Selain perekonomian dunia pendidikan juga mengalami perbaikan pelayanan, karena semenjak pandemi Covid 19, pola pengajaran pada dunia pendidikan berubah drastis, dimana sebelumnya pertemuan hanya terbatas diruang kelas, kini pertemuan juga dapat dilakukan pada jam dan tempat yang terpisah. Selain tatap muka, pemberian tugas dan pelaksanaan ujian kini juga menggunakan jaringan internet sebagai sarana utama, yang membuat hal ini menjadi lebih mudah dalam penyampaian materi dari guru kepada siswa.

Untuk mengatasi permasalahan kesenjangan ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan menyusun sebuah strategi yang dapat menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan infrastruktur komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak salah target, terutama pembangunan yang ada pada wilayah perbatasan yang terpencil. Strategi ini merupakan sebuah instrumen yang dalam pelaksanaannya terdapat perencanaan, (analisis dan desain strategis), pengembangan dan pengujian, implementasi dan monitoring, evaluasi dan perencanaan ulang.

Selain penjaringan aspirasi untuk memaksimalkan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga menyusun perencanaan yang kemudian dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, seperti penyusunan peta proses bisnis, dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

METODOLOGI

Dengan menggunakan dependency theory, Sandra Ball-Rokeach dan Mavlin Defluer menyatakan semakin tinggi media memberikan pemenuhan informasi, maka semakin tinggi pula ketergantungan audiens terhadap media tersebut. Media sebagai sistem yang mempengaruhi, namun dalam perkembangannya teori tersebut berubah menjadi sebagai sistem informasi, dengan kata lain semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut semakin penting untuk orang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menjaga semangat nasionalisme. Kondisi geografis yang sebagian besar merupakan wilayah perbatasan dapat memberikan gambaran yang detail tentang pentingnya semangat nasionalisme. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nunukan pada bulan Februari hingga Mei 2023, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Tanya jawab yang mendalam merupakan salah satu metode yang implementasikan kepada para informan yang telah dianggap kompeten dalam objek penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini diharapkan peneliti mendapatkan informasi yang rinci, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian

2. Observasi Lapangan

Pengamatan yang dilakukan agar peneliti dapat merasakan kondisi, situasi dan keadaan dilapangan, dengan demikian apa yang peneliti lihat, dengar dan rasakan menjadi gambaran atas apa yang terjadi. Pendalaman juga dilakukan terhadap kendala yang ada dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil pengamatan ini akan disusun dalam bentuk catatan, yang kemudian disusun secara terstruktur agar dapat diteliti sebagai data dukung hasil penelitian.

3. Pengumpulan Dokumen

Selama penelitian peneliti akan menghimpun data yang diperoleh seperti transkrip rekaman tertulis, review, catatan lapangan, potret maupun dokumen lainnya yang telah diolah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kecamatan Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu dan Krayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. **Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Nunukan**

Pemerintah Kabupaten Nunukan saat ini dipimpin oleh Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM, Ph.D sebagai Bupati Nunukan dan H. Hanafiah SE, M.Si sebagai Wakil Bupati Nunukan yang dilantik pada 2 Juni 2021 dengan masa bakti 2021-2024. Bupati Nunukan dalam

melaksanakan pemerintahan dibantu oleh 29 Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 Sekretariat, 7 Badan, 19 Badan dan 1 Satuan Polisi Pamong Praja.

Perkembangan Pemerintahan Kabupaten Nunukan, dalam pemerintahan periode ke 2 Bupati Nunukan ini terhitung sangat dinamis, hal ini disebabkan kebijakan dari Presiden Jokowi untuk melakukan penyederhanaan terhadap kebijakan perangkat pemerintahan, mulai dari penghapusan jabatan eselon 4 yang disetarakan dengan jabatan fungsional, hingga perubahan perangkat daerah.

Pemekaran daerah pun tidak luput dari perhatian, Kecamatan Lumbis Ogong pada tahun 2019, dimekarkan menjadi 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu, sehingga dengan pemekaran kecamatan, yang pada awal pembentukan hanya terdiri 5 kecamatan, kini Pemerintah Kabupaten Nunukan telah berkembang menjadi 21 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 240 Desa. Pemekaran ini juga merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mendekati diri dengan masyarakat, dan yang paling utama adalah peningkatan infrastruktur, sehingga pengawasan juga dapat dengan mudah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dalam struktur garis pola KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi) untuk informatika diberikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Kewenangan Bupati ini secara komando turun kepada Sekretaris Daerah, yang kemudian dibantu dengan Asisten Administrasi Umum untuk sebagai pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan.

b. Gambaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pertama kali dibentuk pada tahun 2016, sebagai hasil dari pengembangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, ini merupakan tonggak akselerasi pembangunan jaringan internet dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi.

Pada tahun 2021, dinas ini mengalami perubahan struktur sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai penyederhanaan birokrasi pada pidato kenegaraan tanggal 20 Oktober 2019, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian PAN RB untuk memangkas eselon IV (Jabatan Pengawas), dan kini berubah nomenklatur menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Saat ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang, dimana pembidangan ini bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi publik, bidang informatika, dan bidang statistik sektoral dan persandian, dengan bidang informatika sebagai bidang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pelaksanaan kota cerdas di Kabupaten Nunukan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan, merupakan instansi yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan e-government/Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik serta pembangunan kota cerdas. Pengelolaan e-government adalah sebuah program pemerintah untuk menyesuaikan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dengan harapan teknologi yang telah ada dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta mendukung kehidupan masyarakat dalam melakukan aktivitas.

Bidang Informatika adalah unit kerja yang bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan jaringan internet dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dibidang ini perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terus dipantau, termasuk didalamnya pengembangan kota cerdas dan desa cerdas, sebagai pendukung dari pembentukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

c. Bentuk strategi komunikasi Politik Pemerintah terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara Mendapatkan Informasi

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan, dilaksanakan melalui musrenbang Pemerintah Kabupaten Nunukan mencoba untuk menyaring aspirasi masyarakat terkait pembangunan, yang kemudian dipadukan dengan perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Kewenangan dari pembangunan jaringan komunikasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah membuat sebuah rencana besar dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik., kewenangan informatika yang berada pada pemerintah pusat, menjadikan ini sebuah kerja yang ekstra dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, untuk membangun strategi komunikasi politik pemerintah maka dilakukan hal sebagai berikut:

Kewenangan yang tidak secara utuh berada di Pemerintah Kabupaten Nunukan, membuat pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi harus memiliki sumber yang bervariasi, salah satunya dengan melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat yang memberikan usulan tentang perencanaan pembangunan jaringan internet pada daerah-daerah yang diusulkan. Pembangunan jaringan komunikasi tentu membutuhkan perencanaan yang matang seperti dalam pembangunan jaringan internet di sebuah desa.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan jaringan internet, selain melalui melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2023 juga melakukan penyusunan Proses Bisnis, sebagai rencana utama dalam melakukan pembangunan infrastruktur komunikasi. Penyusunan proses bisnis ini melibatkan pihak dari masyarakat dan unsur pemerintahan desa, pihak pelaksana teknis yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pihak akademisi yang melakukan kajian terhadap situasi dan kondisi di lapangan dengan pencapaian agar target dapat diterima sesuai dengan perencanaan. Selain itu pembangunan proses bisnis juga menjadi perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur komunikasi dari kepentingan masyarakat, pemerintah daerah maupun kepentingan nasional

Pelaksanaan Reformasi birokrasi yang merupakan salah satu program dari pemerintah dan menjadi salah satu instrumen dalam pemenuhan hak komunikasi, hal ini dapat menjadi salah satu strategi politik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, karena didalam penilaian reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Nunukan memiliki kewajiban dalam pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Selain fokus pada pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga melakukan percepatan pembangunan infrastruktur komunikasi dengan mengikuti program kota cerdas, sesuai dengan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022, Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 telah dapat persetujuan untuk melakukan pembangunan kota cerdas, sehingga dengan terintegrasinya pembangunan ini, maka pemerintah Kabupaten Nunukan dapat melakukan pembangunan jaringan secara terintegrasi dan menyeluruh kepada seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.

d. Pemenuhan Hak Komunikasi Warga Negara dalam Mendapatkan Informasi

Hasil perencanaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan baik yang disusun berdasarkan musyawarah perencanaan pembangunan maupun perencanaan yang disusun berdasarkan Peta Proses Bisnis, kemudian dijadikan dasar sebagai tindak lanjut untuk diajukan ke Pemerintah Pusat, hal ini terjadi karena dalam pembangunan infrastruktur komunikasi menjadi kewenangan pemerintah pusat yang sepenuhnya melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam pelaksanaan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah memiliki data terkait titik pembangunan menara untuk mendukung jaringan internet, sampai dengan tahun 2023 telah berhasil dibangun dengan berbagai ukuran dari menara 1 meter hingga menara berukuran 72 meter dan tersebar di 21 Kecamatan dengan total 291 menara.

Melalui program bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, pembangunan infrastruktur dilakukan di Kabupaten Nunukan, yang kemudian disesuaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan, sehingga pembangunan jaringan komunikasi dapat diterima sesuai dengan target yang diharapkan, yakni warga yang berada di daerah perbatasan yang terpencil, sekolah, dan titik keramaian yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Program menara bakti ini adalah salah satu dari program Pra Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana sebelum menerapkan sistem ini Pemerintah Kabupaten Nunukan harus dapat melengkapi infrastruktur jaringan komunikasi.

Tabel 1 : Jumlah Sebaran Menara di Kabupaten Nunukan

No	Lokasi Menara	Jumlah	Keterangan
1	Instansi Pemerintah Kabupaten Nunukan	16	Pemerintah dan Swasta
2	Sekolah	5	Pemerintah
3	Kantor Desa	129	Pemerintah
4	Instansi di Luar Pemkab Nunukan	13	Pemerintah dan Swasta
5	Titik Lainnya	128	Pemerintah dan Swasta
	Total	291	

e. Informasi Memberikan Pengaruh terhadap Semangat Nasionalisme

Hak informasi yang selama ini tidak berimbang yang diterima oleh warga diperbatasan menyebabkan perubahan karakter warga perbatasan, dimana warga diperbatasan menduplikasi perilaku dan sikap warga negara Malaysia, hal ini merupakan dampak yang ditimbulkan karena selama bertahun-tahun warga hanya menerima informasi dari siaran televisi dan radio di Malaysia, sedangkan untuk mendapatkan siaran Indonesia membutuhkan peralatan tambahan. Informasi yang diterima oleh warga dan telah menjadi perilaku sehari-hari, dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan mata uang ringgit dan rupiah dalam transaksi ekonomi, atau pengetahuan umum yang tidak diketahui oleh warga seperti menghafal Pancasila dan menyanyikan lagu kebangsaan.

Kewajiban menjaga semangat nasionalisme adalah sebuah keharusan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun hal ini terkadang tidak dapat berjalan beriringan antara kewajiban menggelorakan semangat dengan pemenuhan hak atas kebutuhan hidup, namun warga perbatasan yang sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan, tetap setia dengan NKRI sebagai harga mati.

Nasionalisme di Kabupaten Nunukan adalah sebuah hal yang menjadi sebuah kewajiban untuk ditanamkan semenjak dini. Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan pembinaan nasionalisme tidak hanya dari pendidikan formal, seperti kewajiban menggunakan bendera Merah Putih pada pakaian sekolah, namun pembinaan ini juga dilaksanakan dengan kampanye kebudayaan maupun kegiatan-kegiatan yang mengundang massa yang besar, seperti pengibaran bendera raksasa didataran paling tinggi di Kabupaten Nunukan yakni bukit Yuvai Semaring di Krayan, pengibaran bendera terpanjang, pembangunan jembatan merah putih di Kecamatan Lumbis Pansiangan, atau bahkan yang paling terkenal pembangunan pembangunan suar ambalat, yang dalam beberapa tahun silam sempat menghebohkan Indonesia dengan permasalahan sengketa perbatasan.

Selain dengan pendidikan nasionalisme semenjak dini, pemerintah juga memiliki kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga rasa kebangsaan dapat tumbuh dan menjadi sebuah falsafah kehidupan yang dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan seperti sembako yang selama ini dipenuhi dari Malaysia, kini semakin dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, sehingga harga kebutuhan bahan pokok menjadi lebih terjangkau dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara langsung, bahkan karena kebutuhan masyarakat yang semakin dapat terpenuhi Pemerintah Kabupaten Nunukan berhasil keluar dari kategori daerah tertinggal pada tahun 2019

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Kabupaten Nunukan, terutama narasumber baik dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melakukan beberapa strategi komunikasi politik untuk menjaring aspirasi dari masyarakat seperti pelaksanaan musrenbang, penyusunan peta proses bisnis, pelaksanaan reformasi birokrasi, maupun pelaksanaan kota cerdas, namun dikarenakan hal ini merupakan

kewenangan pemerintah pusat, maka koordinasi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi menjadi kewajiban yang harus dilakukan, terutama pembangunan jaringan internet di Kabupaten Nunukan.

- b. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengambil kebijakan untuk melakukan pembangunan berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan, sehingga penting bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk melakukan perencanaan secara matang, terutama usulan yang menjadi prioritas dari hasil penjangkaran masyarakat.

REFERENSI

- 1 Antara Kaltara. 2020. Kerawanan konflik antara budaya Indonesia dengan Malaysia: Klaim Kebudayaan. <https://kaltara.antaranews.com/berita/479924/kerawanan-konflik-antara-indonesia-dengan-malaysia-klaim-kebudayaan>
- 2 Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/68/I/2022 tentang Penetapan Mekanisme Hubungan Kerja, Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi di Lingkungan Sekretarat Daerah Kabupaten Nunukan
- 3 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu
- 5 Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Badan nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015
- 6 Rengga, Satria. 2021. Membangun Nunukan (Menuju Nunukan Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing). Micepro Indonesia: Jakarta
- 7 Sistem Informasi Geografis Kabupaten Nunukan. 2023. <http://gis.nunukankab.go.id/tower/kegiatan>